

Opini

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: opini.tribun.jateng@gmail.com, belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

Catatan Pilkada Serentak 2017

PILKADA serentak 2017 telah usai. Secara umum, dari sisi teknis pelaksanaannya dapat dikatakan berjalan lancar. Memang ada riak-riak kecil, tapi tak sampai menimbulkan masalah besar. Khusus di DKI Jakarta, pilkada harus digelar dua putaran karena belum ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50 persen.

Setelah pilkada 2017 selesai, satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah sejauh mana ideologi partai politik dalam mengikuti pilkada. Ada beberapa fenomena yang bisa kita lihat dalam proses pilkada tersebut.

Pertama, ada banyak partai politik yang tak siap mengikuti pilkada, terutama terkait dengan penyiapan kader partai untuk maju berkompetisi di pilkada. Pengurus parpol di daerah memang sangat banyak. Tapi diantara mereka tak banyak yang berani maju pilkada.

Karena tak memiliki stok kader yang siap, maka partai cenderung mengusung calon kepala daerah yang dianggap siap. Tak peduli apakah calon tersebut kader partainya ataukah tidak.

Kecenderungannya, jika tak ada kader yang siap, maka partai lebih memilih mengusung kader partai lain atau seorang pengusaha. Yang terpenting, calon tersebut punya modal pembiayaan dan peluang menangnya besar.

Karena tak memiliki kader, pilkada di beberapa daerah hanya diikuti pasangan calon tunggal. Dari sisi regulasi memang tidak masalah. Karena calon tunggal itu akan melawan kotak kosong. Namun, dari sisi proses demokrasi tidaklah baik. Sebab, rakyat tidak memiliki alternatif pilihan.

Ketidaksiapan partai menyiapkan kader ini dampak dari tidak jalannya sistem pengkaderan partai po-

litik. Hampir semua partai politik di Indonesia tidak memiliki sistem pengkaderan yang jelas, terukur, dan sistematis.

Bahkan, ada beberapa parpol di Jateng yang sudah bertahun-tahun tidak menggelar reorganisasi. Sampai di sini, partai yang seharusnya menjadi medium pendorong demokratisasi, tapi mereka sendiri tak menerapkan sistem demokrasi di dalam mengurus partainya.

Kedua, dalam pilkada 2017 ini partai politik tak memiliki konsep yang jelas dalam membangun koalisi. Bisa dipastikan, koalisi partai dalam mengusung pasangan calon di 101 daerah bisa berbeda-beda.

Di daerah tertentu, partai x berkoalisi dengan partai y melawan partai z. Tapi di daerah lain, partai y berkoalisi dengan partai z untuk melawan kandidat yang diusung partai x. Di satu daerah, dua partai bisa berkoalisi, tapi di daerah lain bisa berkompetisi.

Di satu daerah, sebuah partai mempertimbangkan latar belakang agama kandidat. Namun, di daerah lain, pertimbangan agama kandidat itu bisa diabaikan dengan mudah. Bagi partai politik, siapa yang berpotensi membawa kemenangan akan dijadikan koalisi. Tak peduli ideologi mereka sama atau berbeda.

Koalisi yang dibangun antarpol di masing-masing daerah dalam mengusung kandidat sangat cair. Pengurus partai sepertinya sudah tak peduli ideologi parpol yang diajak koalisi.

Padahal, rekomendasi kandidat dan koalisi itu diputuskan secara terpusat oleh masing-masing pengurus pusat. Karena diputuskan di pusat, idealnya parpol seharusnya mempertimbangkan ideologi dalam menjalin koalisi.

Ketidajelasan konsep koalisi ini akan mengakibatkan kerancuan jika kita melihat peta koalisi dan kandidat yang diusung di masing-masing dae-

rah. Sekali lagi, itu semua bisa terjadi karena dalam membangun koalisi dan mengusung calon, parpol sudah tidak lagi mempertimbangkan ideologi.

Harus diakui, beberapa parpol melakukan proses seleksi. Tapi seperti itu hanya untuk pencitraan dan prosedural saja. Buktinya, ada calon kepala daerah tak ikut mendaftar seleksi, tapi belakangan bisa diusung.

Ketiga, cairnya koalisi parpol mengakibatkan semakin cairnya kandidat dan pemilih. Siapapun bisa maju di pilkada sejauh dia memiliki modal, terutama uang.

Pemenang pilkada ditentukan seberapa mampu seorang kandidat merangkul berbagai kelompok di masyarakat. Mereka tak hanya mengandalkan kelompok masyarakat tertentu.

Untuk itulah, kandidat akan melakukan berbagai upaya untuk mendekati pemilih. Meskipun tindakan itu bisa jadi tak sesuai nuraninya. Ada seorang kandidat kepala daerah yang selama ini dikenal sebagai figur moderat, tapi demi meraih kemenangan ia harus merangkul kelompok-kelompok kanan. Ia rela meninggalkan citra moderat, demi meraih kemenangan.

Selain itu, untuk meraih kemenangan pasangan kandidat juga harus memiliki modal yang cukup untuk menggerakkan pemilih. Sampai di sini, muncul pemilih pragmatis. Mereka akan memilih kandidat yang memberikan sesuatu. Bisa berupa uang maupun barang.

Lagi-lagi, pemilih pilkada rata-rata tak mempertimbangkan ideologi kandidat maupun partai yang

mengusungnya. Buktinya, di berbagai daerah hasil pemilu parpol tak bisa dijadikan sebagai ukuran hasil perolehan kandidat. Di sebuah daerah, ada kandidat yang diusung hingga tujuh partai. Namun, kandidat ini dikalahkan seorang kandidat yang hanya diusung satu parpol.

Berbagai fenomena parpol selama masa pilkada 2017 itu menarik untuk dikaji. Seperti ini, kondisi parpol saat ini sangat berbeda jauh dengan parpol di era orde lama. Kala itu, jumlah partai juga sangat banyak. Tapi identitas dan ideologi yang diusung satu partai dengan partai lain bisa terlihat berbeda.

Parpol memiliki ideologi dan identitas. Pemilih bisa membedakan ideologi antarpol. Misalnya, ada parpol nasionalis (PNI, Partindo, IPKI dan lain-lain), komunis (PKI), islam (NU, Masyumi, PSII), sosialis (PSI-Murba), kristen (Parkindo) dan lain-lain.

Karena memiliki ideologi, maka di era orde lama bisa lahir politikus-politikus yang memiliki karakter. Bagi mereka, politik tak hanya lahan merebut kekuasaan, tapi juga arena perdebatan konsep.

Kini, berharap parpol kembali memiliki ideologi seperti itu sangat sulit. Rakyat juga sudah tidak mpedulikan ideologi parpol. Kita berharap agar parpol bisa memberikan solusi berbagai persoalan bangsa. Untuk itulah, antarpol harus bertarung di tataran politik kebijakan, kinerja, dan kapasitas. Bukan semata-mata saling berebut kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. (*)



MUHAMMAD ROFIUDDIN
DOSEN TAMU DI FISIP UNIP